

POSKO NATARU MENCATAT

Penumpang Angkutan Umum Naik 71,09%

JAKARTA (KR) - Posko Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru 2022/2023) Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mencapai 10,31 juta orang, meningkat 71,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6,03 juta penumpang.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung, dan saya melihat bahwa kekompakan dari pemangku kepentingan ini menjadi kunci dari keberhasilan kita semua," kata Menhub yang secara resmi menutup Posko Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (4/1).

Turut hadir pada Penutupan Posko Angkutan Nataru 2022/2023, Kepala Korlantas Polri Firmans Santyabudi, Kepala Basarnas Henri Alfandi, jajaran Kemenhub, serta jajaran Direksi BUMN dan swasta sektor transportasi.

Menhub menyampaikan, Posko Angkutan Nataru yang telah berlang-

sung sejak 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 tersebut mencatat kenaikan jumlah penumpang terjadi di seluruh moda transportasi baik angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara dan kereta api.

Selain lonjakan penumpang angkutan umum, jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek yang terpantau melalui 4 gerbang tol utama juga meningkat 7,54 persen atau sebanyak 2,24 juta kendaraan, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,07 juta kendaraan.

Sementara itu kendaraan yang masuk Jabodetabek meningkat 7,48 persen atau sebanyak 2,18 juta kendaraan, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,01 juta kendaraan.

Menhub mengungkapkan, gang-

guan cuaca ekstrem di masa libur akhir tahun mengakibatkan terganggunya beberapa perjalanan angkutan umum seperti penundaan ataupun pembatalan perjalanan.

"Kita melihat bahwa gangguan cuaca merupakan tantangan yang paling besar dihadapi pada tahun ini di tengah melonjaknya jumlah penumpang. Apa yang sudah kita siapkan relatif berjalan baik dan tetap ada beberapa evaluasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi gangguan cuaca, sejumlah upaya telah dilakukan. Di antaranya, meningkatkan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan berkoordinasi secara intensif dengan operator sarana dan prasarana transportasi, serta memberikan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem.

Sejumlah catatan yang akan dilakukan evaluasi di antaranya sinkronisasi yang lebih baik antara pengambilan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, pengaturan cuti bersama dan waktu libur sekolah. (Ant/San)-d



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

GALUNGAN DI CANDI PRAMBANAN: Umat Hindu mengikuti prosesi sembahyang Hari Raya Galungan di Candi Prambanan, Sleman, Rabu (4/1). Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia tersebut baru kali pertama digunakan sebagai lokasi sembahyang Hari Raya Galungan.

JAGA NETRALITAS DI TAHUN POLITIK
Kajati dan Kajari Diminta Lakukan Waskat

JAKARTA (KR) - Memasuki tahun politik, eskalasi politik mulai terasa. Untuk itu, Jaksa Agung (Jakgung) Sanitiar Burhanuddin memerintahkan para kepala kejaksaan tinggi (kajati) dan kejaksaan negeri (kajari) di daerah untuk melakukan pengawasan melekat (Waskat) guna menjaga netralitas jajaran pada tahun politik.

"Kepada para pimpinan satuan kerja saya tegaskan untuk melakukan pengawasan melekat guna memastikan netralitas jaksa," kata Burhanuddin dalam Pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Jakarta, Rabu (4/1).

Menurutnya, memasuki tahun politik, eskalasi politik mulai terasa. Terkait hal itu, Kejaksaan mengambil peran sentral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

Burhanuddin menegaskan, untuk dapat melaksanakan tugas jaksa secara profesional dan imparisial, mutlak bagi jaksa untuk tetap menjaga netralitas. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi jajarannya jika kedapatan me-

langgar aturan dan tidak menjaga netralitas. "Apabila ditemukan adanya indikasi perbuatan yang mengarah pada hal tersebut, dipastikan akan dilakukan evaluasi kepada yang bersangkutan," tandasnya.

Rakernas dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, serta diikuti secara virtual Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Rakernas mengusung tema 'Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Pada kesempatan ini Burhanuddin mengatakan makna penegakan hukum humanis adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan sekitar serta memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara profesional. Terhadap hal itu, humanis bukan berarti tunduk pada tekanan yang mempengaruhi kualitas, namun cermat dalam menyerap nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. (Ful)-f

KERJA SAMA KEMENKOMINFO-POLRI
Jaga Ruang Digital Aman Jelang Pemilu

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri) untuk menjaga ruang digital tetap aman menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika pada Oktober 2022.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri di Jakarta, Rabu (4/1) mengatakan, MoU tersebut dimaksudkan untuk memperbarui nota kesepahaman sebelumnya yang diteken 20 Desember 2017 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang

Komunikasi dan Informatika.

"Pembaruan nota kesepahaman ini bertujuan meningkatkan koordinasi dalam rangka sinergitas dan tugas fungsi di bidang komunikasi dan informatika dengan Kemkominfo," kata Asep.

Adapun ruang lingkup yang menjadi perhatian, ujar Asep, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki mutuan yang dilarang, bantuan pengamanan, penegakan hukum, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM).

Mengenai pertukaran data, Men-

teri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, secara khusus hal tersebut termasuk pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi registrasi nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN) dalam rangka melakukan profiling. "Kerja sama Kemkominfo dan Bareskrim sebelum melakukan penegakan hukum, melakukan profiling dan profiling-nya pasti akurat," ujar Johnny.

Sedangkan mengenai penegakan hukum, Johnny mengatakan, Polri dan Kemkominfo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika sesuai tugas dan fungsinya.

(Ant/San)-d

SINAU SEJARAH YOGYA KOTA REPUBLIK
Momentum Penting Menyampaikan Makna Keistimewaan DIY

KEADAAN yang sangat mencekam, memaksa Ibu Kota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta ke Yogya pada 4 Januari 1946 demi keberlangsungan Republik.

Yogya dipilih, selain karena letak geografisnya yang strategis, juga karena adanya dukungan penuh dari Pemimpin Yogya kala itu (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII) serta rakyat Yogya. Jaminan itulah yang menjadi pembeda Yogya dibanding daerah lain di Indonesia, sehingga Yogya disebut sebagai Kota Republik.

Sejarawan UGM, Baha-uddin MHum menuturkan, setelah Proklamasi, kondisi Republik Indonesia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan Soekarno dalam biografinya yang berjudul 'Penyambung Lidah Rakyat' menjelaskan bahwa, negara belum bisa membayar gaji presiden dan para menteri, karena negara belum ada pemasukan.

Dijelaskan Bahauddin, saat Belanda membonceng Sekutu ingin menjajah kembali Indonesia, terjadi pertawanan di semua kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Soekarno terpaksa tidur berpindah-pindah tempat agar tidak ditembak oleh Belanda, karena menjadi incaran utama. Dalam kondisi yang sangat tidak kondusif itu, Pemimpin Yogya (Sultan HB IX dan Pakualam VIII) menawarkan Yogya sebagai ibu kota negara, demi keberlangsungan Republik Indonesia.

"Soekarno dan Hatta memutuskan Yogya kota yang paling tepat sebagai ibu kota negara, karena paling siap sarana prasarannya, birokrasinya untuk menopang roda pemerintahan," terang Bahauddin dalam Dialog Keistimewaan 'Ibu Kota Negara Pindah ke Yogya' di Ruang Jodipathi, SMA Negeri 1 Bantul, Rabu (4/1) siang.

Dialog Keistimewaan ini merupakan rangkaian peringatan kepindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogya, 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949 yang diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY, dan disiarkan live streaming di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY https://youtube.com//PaniradyaKaistimewan.

Dialog Keistimewaan menghadirkan narasumber lain Hendro Muhaimin MA (Tenaga Ahli Parampara Praja dari Pusat Studi Pancasila UGM), Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul), Widiasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY) dengan moderator Wiji Rachmadani.

Lebih lanjut Bahauddin menjelaskan, Ibu Kota RI hanya pernah pindah sekali yaitu di Yogya. Sedangkan Bukittinggi kaitannya membentuk Pemerintahan Darurat RI karena Agresi Militer II Belanda, tapi tidak memindahkan ibu kota. "Yogya adalah satu-satunya kota

yang pernah menjadi ibu kota negara selain Jakarta," katanya.

Menurut Bahauddin, setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pada September 1945 para abdi dalem Kraton Yogya membuat mosi bahwa mereka berdiri di belakang Sultan HB IX dan Republik. Hal yang sama juga dilakukan oleh abdi dalem Pura Pakualaman yang isinya hampir sama.

Kemudian pasca Agresi Militer I Belanda tahun 1947, lanjut Bahauddin, rakyat Yogya secara sukarela menyumbang dana kepada Lembaga Fund Kemerdekaan Indonesia yang didirikan untuk menggalang dana guna mendukung keperluan tentara Indonesia yang berada di garis depan melawan Belanda.

"Penggalangan dana rakyat Yogya periode 1947-1948 itu dipublikasikan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, nama-nama penyumbangnyanya, warung, kelompok masyarakat semua tercatat di situ. Itulah bentuk dukungan riil rakyat Yogya untuk mempertahankan eksistensi Republik Indonesia," katanya.

Saat Yogya menjadi Ibu Kota RI memberikan efek sangat besar bagi Republik. "Kalau tidak ada Yogya, NKRI mungkin tidak selamat dan bisa jadi Indonesia saat ini menjadi negara federal," kata Bahauddin.

Sedangkan Hendro Muhaimin mengatakan, saat usia RI baru seumur jagung, ditambah lagi kedatangan Belanda yang membonceng



Dialog Keistimewaan 'Ibu Kota Negara Pindah ke Yogya'.

Sekutu, dipastikan RI belum memiliki APBN. Setelah ibu kota pindah ke Yogya, Sultan HB IX menyumbang untuk keberlangsungan roda pemerintahan Republik Indonesia. Catatan sejarah lainnya, warga Yogya juga rela menjual perhiasan, ternak untuk membantu para pemimpin pemerintahan untuk melanjutkan Republik.

"Di buku catatan kebijakan moneter periode 1945-1949 belum terungkap penuh APBN pertama dinyatakan ada, sehingga sumbangan Sultan HB IX untuk keberlangsungan Republik, itu adalah APBN pertama Republik Indonesia," katanya.

Hendro berpesan, setelah Yogya ditetapkan sebagai Daerah Istimewa, jangan sampai keistimewaan itu tanpa makna. Kegiatan seperti Sinau Sejarah yang digagas Paniradya Kaisti-

mewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY ini merupakan momentum penting dalam menyampaikan makna-makna keistimewaan yang dimiliki oleh DIY.

"Apa yang kita lakukan saat ini (Sinau Sejarah), menggambarkan bahwa rakyat DIY mendukung upaya untuk memberi makna terhadap kesejarahan, terutama dalam mewujudkan keistimewaan," katanya.

Sementara Agus Tony Widodo menuturkan, ada kendala dalam mensosialisasikan sejarah, terutama terkait peran penting dan kontribusi yang banyak diberikan Yogya untuk Republik, karena dalam kurikulum hanya menjelaskan tentang revolusi fisik saja. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan warga di luar DIY tidak tahu apa keistimewaan yang dimiliki Yog-

ya, sehingga disebut Daerah Istimewa Yogyakarta. "Ditambah lagi tidak ada referensi yang diberikan kepada guru-guru tentang keistimewaan," katanya.

Menurut Tony, kalau ingin serius, maka perlu dibuat kurikulum tentang keistimewaan yang disampaikan kepada pelajar secara tuntas. Selain itu yang tidak kalah penting adalah mengubah metode guru dalam penyampaian pelajaran sejarah, bahwa mengajar sejarah tidak hanya mengetahui sebuah peristiwa sejarah itu terjadi, tapi peristiwa sejarah harus dimaknai, dinalar untuk menumbuhkan semangat melangkah ke depan yang lebih baik.

Widiasto Wasana Putra menuturkan, tidak ada kata terlambat untuk belajar sejarah. Menurutnya, selain kesadaran belajar sejarah, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah metode penyampaian materi sejarah yang juga harus menarik bagi generasi muda. "Metode yang tidak kalah penting dari konten, karena konten di media sosial bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sejarah," katanya.

Terkait dengan peristiwa Ibu Kota RI pindah ke Yogya, menurut Hasto, peristiwa sejarah tersebut sangat menentukan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia (periode 1945-1949), sehingga Republik bisa selamat sampai sekarang.

"Jika dahulu Yogya tidak menjadi ibu kota negara, mungkin alur sejarah tidak seperti ini. Peristiwa Yogya Kota Republik membuka kesadaran sejarah kita menjadi lebih luas," katanya.

Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini dimaksudkan untuk pembelajaran sejarah pada generasi muda, terutama pelajar. Karena itu, di awal acara terlebih dulu diputar video dokumenter 'Yogya Ibu Asuh Republik'.

Acara ini dimeriahkan penampilan tari kreasi 'Arsha Bramanti' oleh siswi SMA Negeri 1 Bantul terdiri Novita, Yuke, Tiara, Syahda dengan koreografer Galuh Putri.

Di penghujung acara tampil Askara Nuswantara dengan formasi Nora (vokal), Ucoq Hutabarat (biola), Danny (bas), Hasan (gitar), Noven (keyboard), Deni (perkusi), Andre (sape). Kelompok musik ini membawakan 'Lagu Indonesia' dan 'Ikrar Nusantara'.

Acara yang dipandu Agus Sunandar dan Alit Jabangbayi ini juga ditandai penyerahan buku Keistimewaan DIY yang diserahkan oleh Ariyanti Luhur Tri Setyaningsih SH selaku Kepala Bagian Pelayanan dan Umum, Paniradya Kaistimewaan DIY kepada perwakilan siswa. Ada pula Kuis Sejarah Berhadiah yang pertanyaannya seputar peristiwa bersejarah Yogya Ibu Kota RI. (Dev)



Tari kreasi 'Arsha Bramanti' siswi SMA Negeri 1 Bantul.



Penampilan Askara Nuswantara.

KR-Devid Permana